

**PROSESI PERALIHAN KEKUASAAN DARI HABIBIE  
KE ABDURAHMAN WAHID : SEBUAH PENELITIAN AWAL**

Reiza D. Dienaputra, Agusmanon Yuniadi dan Dwi Agusta  
Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran  
Jatinangor, Bandung 40600

**ABSTRAK**

Penelitian tentang Prosesi Peralihan Kekuasaan dari Habibie ke Abdurahman Wahid bermaksud mengungkap jalannya proses peralihan kekuasaan dari Habibie ke Abdurahman Wahid. Untuk memperoleh penjelasan genetis tentang jalannya proses peralihan kekuasaan tersebut, penelitian ini menggunakan metode sejarah. Berdasarkan hasil pengamatan awal ini, proses peralihan kekuasaan dari Habibie ke Abdurahman Wahid berlangsung secara demokratis dan konstitusional. Setidaknya ada dua peristiwa penting yang menandai jalannya proses peralihan kekuasaan. Pertama, pemilihan umum pada tanggal 7 Juni 1999. Kedua, proses pemungutan suara dalam pemilihan presiden pada tanggal 20 Oktober 1999. Kedua peristiwa penting dalam proses peralihan kekuasaan dari Habibie ke Abdurahman Wahid membuat peralihan kekuasaan dari Habibie ke Abdurahman Wahid menjadi peralihan kekuasaan pertama yang kesemua prosesnya berlangsung secara demokratis di dalam gedung MPR/DPR. Di samping itu, peralihan kekuasaan ini membuat Abdurahman Wahid menjadi presiden pertama Republik Indonesia yang dipilih melalui proses pemungutan suara. Tegasnya, peralihan kekuasaan dari Habibie ke Abdurahman Wahid merupakan peralihan kekuasaan yang paling demokratis dan konstitusional di Indonesia sepanjang era kemerdekaan.

**Kata kunci :** Prosesi, peralihan kekuasaan, demokratis, pemungutan suara, konstitusional.

**TRANSFER OF POWER PROCESSION FROM HABIBIE  
TO ABDURAHMAN WAHID: A PRELIMINARY STUDY**

**ABSTRACT**

The study of transfer of power procession from Habibie to Abdurahman Wahid is aimed at revealing transfer of power process from Habibie to Abdurahman Wahid. As the study was historical, the historical methods was used. The purpose of this is to get the genetic clarification. Based on this preliminary study, transfer of power process from Habibie to Abdurahman Wahid took place democratically and constitutionally. There were two important affairs which marked the process of transfer of power from Habibie to Abdurahman Wahid. Firstly, the general elections on 7 June 1999. Secondly, the voting process in president election on 20 October 1999. The two important affairs in the transfer of power from Habibie to

Abdurahman Wahid made the transfer of power from Habibie to Abdurahman Wahid became the transfer of power which all of process took place in MPR/DPR building democratically. Besides that, Abdurahman Wahid became the first president of the Republic of Indonesia that was elected by voting process. Explicitly, the transfer of power from Habibie to Abdurahman Wahid was the most democratical and constitutional transfer in Indonesia during independence era.

**Keywords :** Procession, power transfer, democratic, voting, constitutional.

## **PENDAHULUAN**

Derasnya tuntutan bagi munculnya tokoh baru di puncak pimpinan nasional serta kuatnya penolakan terhadap sisa-sisa pemerintahan Orde Baru membuat perjalanan Habibie sebagai presiden RI benar-benar selalu diwarnai oleh berbagai konflik politik. Sejak masa-masa awal pemerintahannya sudah tampak kuat betapa akan sulitnya Habibie untuk sekedar bisa bertahan hingga tahun 2003, apalagi untuk terpilih kembali dalam masa jabatan berikutnya. Kesahihan konstitusional tentang penunjukan Habibie sebagai presiden menjadi perdebatan politik yang tidak kunjung henti.

Menyadari proses terpilihnya sebagai presiden tidak melalui cara yang normal, Habibie pun pada akhirnya bisa menerima kondisi tersebut dan tampak berupaya menempatkan pemerintahannya sebagai pemerintahan transisi. Dengan cara itu, Habibie bisa dikatakan tampak sangat responsive terhadap berbagai ide pembaharuan yang muncul, termasuk ide bagi pembentukan pemerintahan baru yang mendapat legitimasi dari rakyat. Ide bagi diadakannya Sidang Istimewa MPR dan ide bagi diadakannya Pemilu serta pembentukan partai-partai Politik baru dengan tanpa taragu juga direspon pemerintahan Habibie dengan sikap positif. Keterbukaan sikap Habibie terhadap berbagai ide reformasi pada akhirnya benar-benar menempatkan pemerintahan Habibie sebagai pemerintahan transisional. Akibatnya penolakan terhadap tampilnya Habibie sebagai calon presiden pasca Pemilu 1999 juga menguat. Kentalnya tampilan Habibie sebagai tokoh Orde Baru membuat Habibie menjadi orang yang kurang disukai untuk tampil kembali di kursi kepersidenan.

Dalam kondisi seperti itu, menjadi terbuka kemungkinan tampilnya tokoh baru di kursi kepersidenan. Tokoh-tokoh msyarakat yang selama ini dipandang sebagai tokoh reformasi segera muncul menjadi alternatif pengganti Habibie. Di antara sekian banyak tokoh tersebut, setidaknya ada empat kandidat kuat pengganti Habibie, yakni Amien Rais dari Partai Amanat Nasional (PAN), Megawati Soekarnoputri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Abdurahman Wahid dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), serta seorang tokoh nonpartai, Nurcholis Madjid. Sejalan dengan apa yang telah diuraikan di atas, masalahmasalah yang akan dibahas dalam penelitian ini terangkum dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Pertama, bagaimanakah gambaran umum masa Pemerintahan Habibie? Kedua, apakah faktor-faktor penting yang

mempengaruhi proses kejatuhan Habibie? Ketiga, bagaimanakah proses berlangsungnya peralihan kekuasaan dari Habibie ke Abdurahman Wahid?

Selanjutnya, sejalan dengan apa yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah, penelitian ini memiliki tujuan untuk menjawab semua permasalahan yang ada dalam perumusan masalah. Pertama, menuraikan tentang gambaran umum selama pemerintahan Habibie berkuasa. Kedua, mengetahui faktor-faktor penting yang mempengaruhi proses kejatuhan Habibie. Ketiga, mengkaji secara deskriptif analitis tentang proses peralihan kekuasaan dari Habibie ke Abdurahman Wahid.

## **METODE PENELITIAN**

Untuk mengoptimalkan upaya rekonstruksi, penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Di dalam metode penelitian sejarah dikenal adanya empat tahapan kegiatan penelitian. Pertama, heuristik, atau tahapan pengumpulan sumber. Kedua, kritik, atau tahapan seleksi sumber. Ketiga, interpretasi atau tahapan penafsiran sumber. Keempat, historiografi atau tahapan penulisan kisah sejarah.

## **GAMBARAN UMUM SITUASI NASIONAL ERA HABIBIE**

Sejak masa-masa awal pemerintahannya, Habibie langsung berupaya keras untuk bisa mengakomodasikan tuntutan-tuntutan yang menghenmdaki adanya perubahan-perubahan yang cukup mendasar, khususnya di bidang politik. Di luar perombakan kabinet upaya lain yang dilakukan Habibie untuk menjawab tuntutan masyarakat adalah dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan berupa pembaharuan perangkat perundangan, pembebasan para tahanan politik, pembaharuan prangkat perundangan, pembebasan para tahanan politik, pembukaan kebebasan pers, kebebasan mendirikan partai politik, dan pembaharuan hukum dan hak azasi manusia. Di bidang ekonomi, Habibie pun berupaya mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat menurunkan tingkat inflasi, melaksanakan pemulihan ketyersediaan dan keterjangkauan ekonomi, melaksanakan pengembangan ekonomi kerakyatan, melaksanakan restrukturisasi perbankan, dan mengupayakan perbaikan kurs rupiah. Upaya perbaikan kurs rupiah relatif berhasil dilakukan pemerintah Habibie, yakni dengan menguatnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika. Dari kisaran Rp 15.000,- pada awal reformasi menjadi berada pada kisaran Rp. 8.000,- pada bulan September 1998. bahkan sempat menyentuh Rp 6.700,-

Melalui pembebasan tahanan politik, beberapa tahanan politik yang pernah terlibat dalam kasus-kasus politik semasa rezim Soeharto, seperti Ketua Umum Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI) Sri Bintang Pamungklas dan Ketua Umum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Muchtar Pakpahan, dapat kembali menghirup udara segar. Kebijakan pembebasan tahanan politik yang dilakukan Habibie sedikit banyak berhasil mengangkat citra pemerintahan Habibie sebagai

pemerintahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Dukungan atas kebijakan ini tidak hanya datang dari dalam negeri tetapi juga dari luar negeri.

Menjamurnya partai politik di era reformasi seakan mengulang sejarah era Demokrasi Liberal di Indonesia. Bahkan, bila dibandingkan dengan jumlah partai politik yang lahir di era awal Demokrasi Liberal atau pasca keluarnya Maklumat X tanggal 3 Nopember 1945, jumlah partai politik yang ada di era reformasi terbilang jauh lebih banyak, yakni lebih dari tiga kali jumlah partai politik di era Demokrasi Liberal. Jumlah partai politik di era reformasi tercatat sebanyak 141 partai politik, termasuk tiga partai politik lama, yakni PPP, PDI, dan Partai Golkar. Dari 141 partai politik tersebut, yang kemudian mendapat pengesahan Departemen Kehakiman berjumlah 106 partai politik.

Manuver Habibie mengadakan berbagai perubahan politik untuk mendongkrak simpati rakyat terhadap pemerintahannya lambat laun melahirkan harapan-harapan positif rakyat terhadap eksistensi pemerintahan yang dipimpin Habibie. Namun demikian, harapan-harapan yang sudah mulai bermunculan tersebut seakan kembali menjadi pudar manakala Habibie memperlihatkan kebijakan-kebijakan yang terbilang kontroversial dan bertentangan dengan semangat reformasi. Satu di antara kebijakan Habibie yang terbilang kontroversial adalah berkaitan dengan masalah Timor Timur. Tanpa terlebih dahulu melalui proses konstitusional, yaitu meminta persetujuan legislative, Habibie menawarkan dua opsi bagi penyelesaian kasus Timor Timur, yakni opsi tetap bergabung dengan Indonesia atau merdeka. Di samping kebijakan pemberian opsi terhadap Timor Timur, kebijakan lain yang juga turut mengganggu kinerja pemerintahan Habibie adalah ketidaktegasan Habibie dalam menyelesaikan kasus Bali (Naligate).

Derasnya upaya-upaya perubahan politik yang ditempuh Habibie, bagi kekuatan-kekuatan politik yang sejak awal menentang tampilnya Habibie di kursi kepresidenan dapat dikatakan tidak mengurangi sikap krisis dan keras kekuatan penentang tersebut. Menyadari bahwa tuntutan bagi diadakannya SI MPR dan pemilihan umum merupakan tuntutan paling penting yang perlu segera direspon pemerintah, Habibie pun segera menempuh langkah-langkah strategis.

Sejalan dengan kesepakatan antara pemerintah dan DPR, SI MPR yang menjadi tuntutan reformasi dilaksanakan pada tanggal 10 –13 Nopember 1998. Dalam sidang istimewa yang sarat dengan konflik kepentingan ini, berhasil ditetapkan 12 buah Ketetapan MPR yang satu di antaranya berupa Ketetapan MPR tentang pencabutan dan perubahan Tap MPR No.III/MPR/1998 tentang pemilihan umum. Meskipun SI MPR ini semakin membuka jalan bagi dilaksanakannya pemilihan umum, namun secara umum hasil-hasil SI MPR 1998 ini kurang merespon tuntutan mendasar kelompok-kelompok reformis khususnya tuntutan tentang penghapusan peran ABRI di MPR/DPR. Akibatnya, SI MPR ini harus dibayar mahal dengan gugurnya lima orang demonstran dari kalangan mahasiswa dan lebih dari 200 orang mengalami luka-luka oleh sikap represif aparat keamanan.

Sebagai tindak lanjut dari hasil-hasil yang dicapai SI MPR 1998, pemerintah segera mempersiapkan berbagai perangkat pendukung bagi terselenggaranya suatu pemilihan umum yang luber dan jujur. Keseriusan pemerintah dalam merespon tuntutan pemilihan umum semakin menjadi jelas setelah Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie pada tanggal 1 Februari 1999 mengesahkan tiga produk perundang-undangan yang memiliki keterkaitan erat dengan pelaksanaan pemilihan umum. Pertama, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik. Kedua, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Ketiga, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Seiring dengan keluarnya Undang-undang Nomor 3 tahun 1999, proses pelaksanaan pemilihan umum pun mulai memasuki langkah-langkah yang lebih konkrit. Salah satu langkah konkrit yang kemudian segera diambil pemerintah adalah melakukan verifikasi terhadap partai-partai politik peserta pemilihan umum. Untuk kepentingan ini, pemerintah membentuk Panitia Persiapan Pembentukan Komisi Pemilihan Umum (P3KPU) atau lebih dikenal dengan Tim Sebelas. Dari 60 partai politik yang memenuhi persyaratan administrative setelah dilakukan verifikasi, Tim Sebelas merekomendasikan 48 partai politik yang dapat mengikuti Pemilihan Umum 1999. Sisanya sebanyak 12 partai politik gagal memperoleh rekomendasi Tim Sebelas. Atas dasar verifikasi P3KPU, Syarwan Hamig selaku Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Lembaga Pemilihan Umum (LPU) mengeluarkan Surat Keputusan No.3 Tahun 1999 tentang pengesahan 48 partai politik sebagai peserta Pemilu 1999.

Tidak berapa lama setelah Mendagri Syarwan Hamid mensahkan 48 partai politik serta pemilihan umum, pemerintah kembali memperlihatkan kekonsistennannya dalam menjawab tuntutan reformasi total, dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 77/M/1999 tertanggal 10 Maret 1999 tentang penetapan lima orang wakil pemerintah dan 48 orang wakil partai politik sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dengan ditetapkannya anggota KPU serta terbentuknya pengurus KPU melalui pemilihan yang demokratis oleh para anggota KPU, secara otomatis sejalan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999, tugas LPU telah berakhir. Selanjutnya, kewajiban untuk melaksanakan pemilihan umum sepenuhnya menjadi wewenang KPU.

Terbentuknya KPU dalam sejarah pemilihan umum di Indonesia jelas merupakan sebuah perubahan besar dalam tradisi demokrasi di Indonesia. Untuk pertama kalinya sejak Pemilu 1971, Pemilu 1999 tidak menempatkan pemerintah, dalam hal ini Mendagri, sebagai ketua pemilihan umum. Sebaliknya. Memberikan kewenangan besar kepada partai-partai politik peserta pemilihan umum untuk mengatur dan melaksanakan pemilihan umum. Dengan perubahan ini, harapan bagi terselenggaranya pemilihan umum yang luber dan jujur semakin mendekati kenyataan.

## **JALAN TENGAH KE ARAH PERUBAHAN**

Sesuai dengan yang telah direncanakan, pemilihan umum yang menjadi tuntutan reformasi diadakan pada tanggal 7 Juni 1999, Berdasarkan hasil penghitungan suara, dari 48 partai politik peserta pemilu, muncul tujuh partai politik yang dianggap sebagai partai politik pemenang pemilu, yakni, PDIP, Partai Golongan karya, partai Persatuan Pembangunan, partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan bangsa, Partai Bulan bintang, dan Partai Keadilan. Namun demikian, di antara ketujuh partai politik tersebut, tidak ada satupun yang berhasil meraih suara mayoritas. Dua besar peraih suara terbanyak dipegang oleh PDIP dan Golkar, dengan selisih suara yang tidak terlalu signifikan. Perbedaan selisih suara yang tidak terlalu jauh di antara partai-partai peserta pemilu yang berhasil meraih kursi di DPR memperlihatkan perbedaan mendasar antara Pemilu 1999 dengan pemilu-pemilu sebelumnya, sekaligus memperlihatkan kemungkinan ketatnya tingkat kompetisi di antara partai-partai politik tersebut dalam memperebutkan sumber-sumber kekuasaan politik, khususnya perbuatan kursi kepresidenan. Dalam kondisi ini, tinggi rendahnya kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki setiap partai politik yang memiliki wakil di DPR serta kepiawaian partai-partai politik dalam mengatur taktik dan strategi yang tepat akan sangat menentukan keberhasilan dalam merebut sumber-sumber kekuasaan politik.

Berakhirnya pesta demokrasi segera diikuti oleh semakin mengerasnya tuntutan bagi pelaksana Sidang Umum (SU) MPR, dengan agenda utama pemilihan presiden. Tuntutan bagi percepatan SU MPR jelas merupakan suatu kewajaran di tengah tetap kerasnya tuntutan reformasi total. Setelah SI MPR 1998 dan Pemilu 7 Juni 1999, SU MPR akan menjadi arena terakhir bagi upaya pemenuhan tuntutan bagi suatu reformasi total. Dalam SU MPR inilah akan ditentukan pimpinan legislative serta yang paling penting. Pemilihan presiden. Dengan dimulainya SU MPR pada tanggal 1 Oktober, dimulai pula pertarungan politik di antara berbagai kekuatan politik pemenang pemilu.

Berkaitan dengan calon presiden, berada dengan waktu-waktu sebelum dimulainya SU MPR dan Pemilu 1999, hingga menjelang dilangsungkannya pidato pertanggungjawaban Habibie sebagai presiden, hanya memunculkan dua kandidat kuat, yakni B.J. Habibie yang dicalonkan Partai Golkar dan Megawati Soekarnoputri yang dicalonkan PDIP. Abdurahman Wahid yang dicalonkan secara resmi oleh Fraksi Reformasi (gabungan PAN dan PK) pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 1999 tampil sebagai calon alternatif, sekaligus kuda hitam. Melihat hasil suara yang diperoleh partai-partai politik pemenang pemilu, pada dasarnya memang hanya Habibie dan Megawati lah yang memiliki kemungkinan besar terpilih sebagai presiden RI. Perbedaan suara yang tidak terlalu mencolok di antara PDIP dan Partai Golkar menjadikan kedua kandidat menebarkan sikap optimis dalam meraih kursi kepresidenan. Tinggal bagaimana kedua partai politik tersebut berupaya mencari dukungan suara dari partai-partai politik lainnya.

Perkembangan situasi yang demikian cepat pasca penolakan pidato pertanggungjawaban Habibie oleh MPR yang kemudian diikuti pengunduran diri

**Prosesi Peralihan Kekuasaan dari Habibie ke Abdurahman Wahid: Sebuah Penelitian Awal (Reiza D. dkk.)**

---

Habibie dari bursa pencalonan Habibie memaksa Poros Tengah semakin intens menggelar manuver-manuver politiknya. Dalam kondisi inilah, taktik dan strategi kekuatan-kekuatan politik yang saling berhadapan akan menentukan sukses tidaknya manuver politik yang dilakukan. Kepintaran kekuatan Poros Tengah yang dikomandoi Amien Rais serta rendahnya kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki PDIP di dalam gedung MPR menjadikan peraturan politik tersebut lebih berpihak ke poros Tengah. Melalui berbagai pertemuan politik yang cukup alot, menjelang detik-detik terakhir pemilihan presiden, calon presiden dari Poros Tengah berhasil memperoleh dukungan politik dari sebagian besar wakil Partai Golkar di MPR.

Aliansi strategis yang dibuat Poros Tengah dengan Partai Golkar pada akhirnya menjadi penentu kemenangan calon dari Poros Tengah melalui pemungutan suara yang berlangsung secara tertutup dan demokratis, Abdurahman Wahid berhasil mengungguli Megawati Soekarnoputri dengan perbandingan suara 373 berbanding 313. Bertitik tolak dari hasil pemungutan suara ini, Rapat Paripurna MPR yang berlangsung Rabu siang tanggal 20 Oktober 1999 menetapkan Abdurahman Wahid sebagai presiden Selanjutnya, pada malam harinya dilakukan pengambilan sumpah jabatan presiden yang diteruskan dengan penyampaian pidato presiden.

Dengan ditetapkannya Abdurahman Wahid sebagai presiden, secara otomatis sejak saat itu Indonesia memiliki presiden baru. Pengambilan sumpah Abdurahman Wahid sebagai presiden juga sekaligus menjadi pertanda konkrit telah terjadinya peralihan kekuasaan secara damai dan konstitusional dari Bacharuddin Jusuf Habibie kepada Abdurahman Wahid. Bila dibandingkan dengan dua proses peralihan kekuasaan sebelumnya, yakni dari Soekarno ke Soeharto dan dari Soeharto ke Habibie, peralihan kekuasaan presiden dari Habibie ke Abdurahman Wahid dapat dikatakan merupakan peralihan kekuasaan yang paling konstitusional dan demokratis sepanjang sejarah peralihan kekuasaan presiden di Indonesia. Sejak Indonesia merdeka, baru Abdurahman Wahid lah yang terpilih sebagai presiden RI lewat pemilihan yang demokratis di dalam lembaga tertinggi negara.

Perjalanan proses peralihan kekuasaan yang sangat demokratis dan konstitusional dari Habibie ke Abdurahman Wahid sekaligus menjadi pertandatelah masuknya Indonesia ke dalam deretan negara demokratis terbesar di dunia. Sebagaimana halnya Abdurahman Wahid, Megawati Soekarnoputri pun tampil sebagai wakil presiden melalui pemilihan yang demokratis. Megawati, yang dicalonkan Fraksi partai Kebangkitan Bangsa sebagai wakil presiden, mengalahkan Hamzah Haz, calon dari Fraksi partai Persatuan Pembangunan, dengan perbandingan suara, 396 berbanding 284 suara. Terpilihnya Megawati sebagai wakil presiden tidak hanya sekedar menjadikannya sebagai wanita Indonesia pertama yang berhasil menduduki jabatan wakil presiden tetapi sekaligus menjadikannya sebagai wakil presiden pertama yang dipilih secara demokratis.

## KESIMPULAN

Naiknya Habibie sebagai presiden menggantikan Soeharto, sebagaimana diduga, menimbulkan sikap pro dan kontra, Menyadari posisinya yang kurang begitu menguntungkan, sejak masa-masa awal pemerintahannya. Habibie berupaya menampilkan dirinya sebagai sosok yang reformis. Pembebasan para tahanan politik, kebebasan mendirikan partai politik, serta kebebasan pers, merupakan sebagian contoh kebijakan politik yang terbilang sangat maju yang dikeluarkan pemerintahan Habibie.

Keinginan para mahasiswa dan para elit politik bagi terlaksananya reformasi total, dengan cara mengadakan Sidang Istimewa (SI) MPR dan Pemilihan Umum (Pemilu), juga direspon secara positif oleh pemerintah Habibie. SI MPR yang menjadi tuntutan kalangan reformis digelar pada tanggal 10 hingga 13 Nopember 1998. Selanjutnya, sebagaimana diamanatkan MPR dalam sidang istimewanya, Pemerintah Habibie pun segera mengambil langkah-langkah konkrit bagi pelaksanaan Pemilu yang direncanakan berlangsung pada tanggal 7 Juni 1999.

Berbagai perubahan mendasar yang dilakukan pemerintah Habibie, dalam perkembangan selanjutnya ternyata kurang mendatangkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Kedekatan Habibie dengan presiden sebelumnya membuat Habibie sulit dipisahkan dari rezim Soeharto. Tegasnya, betapapun kerasnya upaya-upaya pembaharuan yang dilakukan Habibie, ia tetap dipandang tidak lebih dari perpanjangan tangan Soeharto.

Posisi kurang menguntungkan yang mau tidak mau harus disandang Habibie pada akhirnya benar-benar menjadi bumerang bagi karir politiknya. Keinginan Habibie untuk tetap berkiprah di pentas politik Indonesia mendapat penentangan kuat dari kekuatan-kekuatan anti-Habibie, baik yang berada di dalam gedung MPR maupun di luar gedung MPR. Ketakutan berlebihan dari para elite politik yang berada di dalam gedung MPR tentang kemungkinan akan kembalinya kekuatan Orde Baru mengakibatkan Habibie harus mengakhiri karir politiknya secara tragis. Pidato pertanggungjawaban yang disampaikan Habibie di depan MPR pada tanggal 14 Oktober 1999, secara mengesankan ditolak MPR dalam rapatnya pada tanggal 20 Oktober 1999. Dengan penolakan ini, Habibie harus mengurungkan niatnya untuk masuk dalam bursa pencalonan presiden RI periode 1999-2004.

Pasca pengunduran Habibie sebagai kandidat presiden, bursa calon presiden tinggal menyisakan dua orang calon, yakni Megawati Soekarnoputri, yang dicalonkan F-PDIP, dan Abdurahman Wahid, yang dicalonkan Fraksi Reformasi dan Poros Tengah. Pertarungan politik di antara dua kandidat ini secara tidak terduga pada akhirnya dimenangkan oleh calon yang sebelumnya kurang begitu diunggulkan, yakni Abdurahman Wahid, dengan perbandingan suara 373 berbanding 313. Dengan hasil perolehan suara seperti itu, Abdurahman Wahid kemudian ditetapkan MPR sebagai presiden ke-4 Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 1999.

**Prosesi Peralihan Kekuasaan dari Habibie ke Abdurahman Wahid: Sebuah Penelitian Awal (Reiza D. dkk.)**

---

Tampilnya Abdurahman Wahid sebagai presiden RI dalam SU MPR 1999 menjadikan peralihan kekuasaan dari Habibie kepada Abdurahman Wahid menjadi peralihan kekuasaan presiden yang paling demokratis dan konstitusional sepanjang sejarah ketatanegaraan Indonesia. Abdurahman Wahid sekaligus merupakan satu-satunya presiden RI yang terpilih secara demokratis melalui pemilihan suara di lembaga legislative tertinggi. Lebih istimewa lagi, Abdurahman Wahid juga bukan berasal dari partai politik yang berhasil meraih suara terbanyak. Ia hanyalah seorang deklarator partai politik yang bernama Partai Kebangkitan bangsa (PKB). PKB sendiri dalam Pemilu 1999 hanya menduduki ranking keempat dalam perolehan suara atau berada di bawah PDIP, Partai Golkar, dan PPP.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Calvert, Peter. 1995. *The Process of Political Succession*. Terjemahan oleh Misbah Zulfa Elizabeth, Endi Haryono, dan Supriyanto Abdullah Yogyakarta : Tiara Wacana
- Dienaputra, Reiza, dkk. 1994, Suksesi Kepemimpinan di Indonesia: Studi tentang Proses Peralihan Kekuasaan dan Soekarno ke Soeharto. Bandung Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran
- Hill, Hal. 1996. *The Indonesian Economy Since 1966; Southeast Asia's Emerging Giant*. Terjemahan oleh Tim PAU Ekonomi UGM Yogyakarta PAU-Studi Ekonomi UGM – Tiara Wacana.
- Mulyosudarmo, Suwoto. 1997. Peralihan Kekuasaan: Kajian Teoritis dan Yuridis. Jakarta: Gramedia.
- Suryakusuma, Julia I., dkk. T.t Almanak Parpol Indonesia: Pemilu'99. Bogor SMK Grafika Mardi Yuana.

**Majalah, Tabloid, dan Koran**

- Adil, 20-26 Mei 1998.
- Aksi, 16-22 Juni 1998.
- Forum Keadilan, Nomor 5, Tahun VII, 15 Juni 1998.
- Kompas, No.321 Tahun Ke-22, 26 Mei 1998
- Kompas No.324 Tahun Ke-33, 29 Mei 1998.
- Kompas No.325 TahunKe-33, 30 Mei 1998.
- Kompas, No.138 Tahun Ke-34, 14Nopember 1999.
- Kompas, No.213 tahun Ke-34, 2 Februari 1999.

- Kompas, No.244 Tahun Ke-34, 5 Maret 1999.  
Kompas, No.250 Tahun Ke-34, 11 Maret 1999.  
Kompas, No.311 tahun Ke-34, 15 Mei 1999  
Kompas, N0.089 Tahun Ke 35, 25 September 1999.  
Kompas, No.109 Tahun Ke-35, 15 Oktober 1999.  
Kompas, No.115 Tahun Ke-35, 21 Oktober 1999.  
Kompas, No.116 Tahun Ke-35, 22 Oktober 1999  
Media Indonesia, No.6955 tahun XXX, 27 Oktober 1999.  
Media Indonesia, No.6978 tahun XXX, 27 Oktober 1999.  
Potret'98 Kilas Balik Harian Umum Repoblika, Selasa, Selasa 29 Desember 1998  
Tekad, No.48/Tahun 1,27 September- 3 Oktober 1999.  
Tekad, No.52/Tahun I, 18-24 Oktober 1999.  
Tekad No.53/Tahun I, 25-31 Oktober 1999.  
Tekad, No.01/Tahun II, 1-7 Nopember 1999.